



RENJA

RENCANA KERJA

2026

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



Jl. H. Zainir Havis, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Lt. 3



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025;
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUGAN HIDUP KOTA JAMBI TAHUN 2026.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di J A M B I
Pada Tanggal 28 AGUSTUS 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERI, SP, M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Pemerintah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi.
5. Ar s i p.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

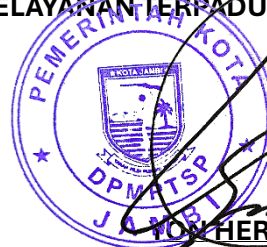
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman strategis bagi DPMPTSP Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.

Harapan kami, Renstra DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Jambi, Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



YOHANIS HERI, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 5

1.1 Latar Belakang5

1.2 Landasan Hukum6

1.3 Maksud dan Tujuan8

1.3.1 Maksud8

1.3.2 Tujuan.....8

1.4 Sistematika Penulisan.....9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2024..... 10

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI37

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. 38

3.3 Program dan Kegiatan..... 40

3.3.1 Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan 40

3.3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH44

BAB V PENUTUP49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025..... 10

Tabel 2. 2 TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Jambi 13

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kota Jambi 19

Tabel 2. 4 TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi..... 20

Tabel 2. 5 TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Jambi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Jambi 39

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kota Jambi 39

Tabel 4. 1 TC 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 45

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan berpedoman pada Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Perencanaan yang baik sangat penting dan diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tidak meninggalkan peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja diperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kota Jambi dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2026 mengacu kepada Renstra DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2026. Selain itu, dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2026 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) dan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Renja disusun sebagai acuan perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penyusunan Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi DPMPTSP Kota Jambi. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Jambi sebagaimana diinginkan

oleh kepala daerah Kota Jambi. Adapun prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja perangkat daerah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD.
3. Rumusan Program/Kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif perangkat daerah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, dan total kebutuhan dana.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Jambi dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengadiln dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah

- Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
 13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
 14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
 15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025; dan
 16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 beserta rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ anggaran daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (DPMPTSP) untuk menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026 berdasarkan Renstra DPMPTSP tahun 2025-2029.
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mengupayakan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPTSP.
5. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renja DPMPTSP Kota Jambi di Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Jambi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
- 2.6

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi – evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Jambi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan keuangan sesuai DPA Tahun 2024 **Rp. 9.867.163.000,-** dengan Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 9.015.736.614** atau sebesar **91,37%**. yang berarti masuk dalam kategori berhasil. Adapun rincian Perprogram dan Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN REKENING	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					FISIK (%)	KEUANGAN (%)
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.291.195.000	9.867.163.000	9.015.736.614	100,00%	91,37%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.100.475.973	8.037.591.365	7.246.795.336	100,00%	90,16%
2.18.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	120.718.789	113.279.290	107.585.310	100,00%	94,97%
2.18.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	48.792.127	46.864.128	45.508.395	100%	97,11%
2.18.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71.926.662	66.415.162	62.076.915	100%	93,47%
2.18.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.585.999.837	4.549.878.837	4.001.763.215	100,00%	87,95%
2.18.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.155.571.959	4.155.571.959	3.618.611.080	100%	87,08%
2.18.01.2.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	420.221.562	384.100.562	379.382.695	100%	98,77%
2.18.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.120.504	4.120.504	1.473.440	100%	35,76%
2.18.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	6.085.812	6.085.812	2.296.000	100%	37,73%

2.18.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	255.730.000	192.811.500	158.768.360	100,00%	82,34%
2.18.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	136.530.000	132.811.500	126.873.000	100%	95,53%
2.18.01.2.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	119.200.000	60.000.000	31.895.360	100%	53,16%
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	726.517.726	739.247.188	725.005.329	100,00%	98,07%
2.18.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.344.987	9.825.199	7.825.200	100%	79,64%
2.18.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	154.818.289	147.381.625	145.604.850	100%	98,79%
2.18.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	63.828.200	56.564.114	56.364.965	100%	99,65%
2.18.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	165.526.250	165.526.250	158.416.250	100%	95,70%
2.18.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	330.000.000	359.950.000	356.794.064	100%	99,12%
2.18.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	832.680.000	832.680.000	832.680.000	100,00%	100,00%
2.18.01.2.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	826.200.000	826.200.000	826.200.000	100%	100,00%
2.18.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	6.480.000	6.480.000	6.480.000	100%	100,00%
2.18.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.034.811.221	1.147.431.395	1.028.225.922	100,00%	89,61%
2.18.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	494.150.000	644.150.000	544.543.472	100%	84,54%
2.18.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	540.661.221	503.281.395	483.682.450	100%	96,11%
2.18.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	544.018.400	462.263.155	392.767.200	100,00%	84,97%
2.18.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	13.000.000	13.000.000	12.526.900	100%	96,36%
2.18.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	346.730.000	312.600.000	244.475.393	100%	78,21%
2.18.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.399.500	50.399.500	49.859.500	100%	98,93%
2.18.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	133.888.900	86.263.655	85.905.407	100%	99,58%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	163.614.027	133.146.902	130.526.150	100,00%	98,03%
2.18.02.2.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.614.027	133.146.902	130.526.150	100,00%	98,03%
2.18.02.2.01.0001	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	163.614.027	133.146.902	130.526.150	100%	98,03%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	305.199.495	210.321.500	207.090.925	100,00%	98,46%
2.18.03.2.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.199.495	210.321.500	207.090.925	100,00%	98,46%
2.18.03.2.01.0002	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.199.495	210.321.500	207.090.925	100%	98,46%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	820.574.768	683.036.016	668.688.980	100,00%	97,90%
2.18.04.2.01	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	820.574.768	683.036.016	668.688.980	100,00%	97,90%
2.18.04.2.01.0005	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	78.714.060	72.660.000	72.510.000	100%	99,79%
2.18.04.2.01.0006	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	540.063.550	457.915.156	445.721.865	100%	97,34%
2.18.04.2.01.0007	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	76.662.874	55.832.631	54.369.786	100%	97,38%
2.18.04.2.01.0008	PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	125.134.284	96.628.229	96.087.329	100%	99,44%

2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	843.840.089	745.576.569	705.696.248	100,00%	94,65%
2.18.05.2.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	843.840.089	745.576.569	705.696.248	100,00%	94,65%
2.18.05.2.01.0004	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	106.047.011	105.759.491	92.392.470	100%	87,36%
2.18.05.2.01.0005	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	289.688.957	289.688.957	275.003.596	100%	94,93%
2.18.05.2.01.0006	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	448.104.121	350.128.121	338.300.182	100%	96,62%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	57.490.648	57.490.648	56.938.975	100,00%	99,04%
2.18.06.2.01	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.490.648	57.490.648	56.938.975	100,00%	99,04%
2.18.06.2.01.0002	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	57.490.648	57.490.648	56.938.975	100%	99,04%
TOTAL PAGU ANGGARAN DPMPTSP TAHUN 2024		10.291.195.000	9.867.163.000	9.015.736.614	100,00%	91,37%

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2024 dengan melihat evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tahun sebelumnya dan jika dilihat dari serapan anggaran tahun 2024, Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC 29 Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Tabel 2. 2 TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Jambi

KODE REKENING	URAIAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN N-2) 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (TAHUN N-2) 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (TAHUN N-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.867.163.000	9.015.736.614	91,37%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	8.037.591.365	7.246.795.336	87,52%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai AKIP	74	74	113.279.290	107.585.310	95,29%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	46.864.128	45.508.395	97,11%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	66.415.162	62.076.915	93,47%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	4.549.878.837	4.001.763.215	64,83%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.155.571.959	3.618.611.080	87,08%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	384.100.562	379.382.695	98,77%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.120.504	1.473.440	35,76%	100%	100%	100,00%

2.18.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	6.085.812	2.296.000	37,73%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	100%	192.811.500	158.768.360	74,34%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	132.811.500	126.873.000	95,53%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	60.000.000	31.895.360	53,16%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	739.247.188	725.005.329	94,58%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9.825.199	7.825.200	79,64%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 31 Unit	3 Paket 31 Unit	147.381.625	145.604.850	98,79%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	56.564.114	56.364.965	99,65%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	165.526.250	158.416.250	95,70%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	359.950.000	356.794.064	99,12%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	832.680.000	832.680.000	100%	100,00%	100,00%	100,00%

2.18.01.2.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	826.200.000	826.200.000	100%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	40 Buah	40 Buah	6.480.000	6.480.000	100%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.147.431.395	1.028.225.922	90,32%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	644.150.000	544.543.472	84,54%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	21 Laporan	503.281.395	483.682.450	96,11%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah			462.263.155	392.767.200	93,27%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	34 Unit	13.000.000	12.526.900	96,36%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	27 Unit	312.600.000	244.475.393	78,21%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	50.399.500	49.859.500	98,93%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	86.263.655	85.905.407	100%	100%	100%	100,00%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Investasi	90%	90%	133.146.902	130.526.150	98,03%	100,00%	100,00%	100,00%

2.18.02.2.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	133.146.902	130.526.150	98,03%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.02.2.01.0001	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	133.146.902	130.526.150	98,03%	100%	100%	100,00%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	210.321.500	207.090.925	98,46%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.03.2.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	2 Dokumen	2 Dokumen	210.321.500	207.090.925	98,46%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.03.2.01.0002	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	210.321.500	207.090.925	98,46%	100%	100%	100,00%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100%	100%	683.036.016	668.688.980	98,49%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.04.2.01	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tertaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	100%	100%	683.036.016	668.688.980	98,49%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.04.2.01.0005	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	72.660.000	72.510.000	99,79%	100%	100%	100,00%
2.18.04.2.01.0006	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	4.250 Pelaku Usaha	4.250 Pelaku Usaha	457.915.156	445.721.865	97,34%	100%	100%	100,00%

2.18.04.2.01.0007	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	55.832.631	54.369.786	97,38%	100%	100%	100,00%
2.18.04.2.01.0008	PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	450 Kegiatan Usaha	450 Kegiatan Usaha	96.628.229	96.087.329	99,44%	100%	100%	100,00%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	745.576.569	705.696.248	92,97%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.05.2.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	745.576.569	705.696.248	92,97%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.05.2.01.0004	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	11 Kegiatan Usaha	105.759.491	92.392.470	87,36%	100%	100%	100,00%
2.18.05.2.01.0005	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	289.688.957	275.003.596	94,93%	100%	100%	100,00%

2.18.05.2.01.0006	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha	350.128.121	338.300.182	96,62%	100%	100%	100,00%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	57.490.648	56.938.975	99,04%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.06.2.01	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	100%	57.490.648	56.938.975	99,04%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.06.2.01.0002	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	7 Dokumen	57.490.648	56.938.975	99,04%	100%	100%	100,00%
TOTAL PAGU ANGGARAN DPMPTSP TAHUN 2024					9.867.163.000	9.015.736.614	91,37%	100,00%	100,00%	100,00%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal Secara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi investor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal.

Sesuai dengan Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bidang Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki tolak ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum. Seiring dengan perubahan waktu dan sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, fungsi pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi hingga saat ini.

Capaian Kinerja Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2024 dapat dianalisis melalui capaian Indikator Kinerja Utama selama tahun 2024. Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan diukur dan dievaluasi setiap tahunnya. Sehingga tergambar program dan kegiatan mana yang terealisasi dan mana yang tidak terealisasi serta seberapa jauh indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Secara terperinci capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kota Jambi

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Persentase Realisasi 2024 Terhadap Realisasi 2023
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	750 M	1.062 M	142%	1.429 M	1.813 M	127%	112%

Tabel 2. 4 TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		IP ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

3	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

6	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
---	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, dalam hal ini untuk penilaian IKM tahun 2024 dan 2025 tidak termasuk didalam RENJA OPD, tetapi didalam tujuan dan sasaran Daerah Kota Jambi hanya Realisasi Investasi, yang mana angka realisasi Investasi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk angka Realisasi Investasi yang ditargetkan dalam RENJA OPD Tahun 2026 sebesar RP. 2 T.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis merupakan masalah atau tantangan yang memiliki dampak signifikan dan luas terhadap suatu organisasi, komunitas, atau negara. Isu strategis seringkali memerlukan perhatian dan penanganan yang serius karena dapat mempengaruhi tujuan, visi, dan misi. Dalam perencanaan pembangunan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu memperhatikan isu-isu strategis agar bisa mengembangkan potensi dan merumuskan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah, adapun yang menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana agar bisa memberikan pelayanan secara optimal.
2. Koordinasi untuk mempercepat terbitnya Rencana Detail Tata Ruang serta penyiapan peta potensi investasi Kota Jambi serta ketersediaan kebijakan kemudahan berinvestasi.
3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan promosi investasi untuk menumbuhkan minat pelaku usaha melakukan penanaman modal di Kota Jambi.
4. Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan pengetahuan petugas pemberi layanan serta efektivitas sistem kerja tim teknis pelayanan perizinan dari Perangkat Daerah.
5. Peningkatan ketersediaan data dan informasi penanaman modal dari laporan pelaku usaha sebagai bahan kebijakan penanaman modal.
6. Optimalisasi koordinasi antar instansi pemberi layanan pada Mal Pelayanan Publik, integrasi layanan, kemudahan aksesabilitas informasi serta penerapan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur pada Mal Pelayanan Publik Kota Jambi.

Semua Program atau Kegiatan pada DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 menunjang pada Keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2024 tercapai, Realisasi Investasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **1.813.281.873.255** atau sebesar **126.89 %**.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2026, hal ini disebabkan karena program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

Riview terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.4 TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 KOTA JAMBI dibawah berikut ini :

Tabel 2. 5 TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Jambi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA JAMBI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	BB	7.850.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA JAMBI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	BB	7.850.000.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	MENINGKATNYA NILAI SAKIP	74	22.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	MENINGKATNYA NILAI SAKIP	74	22.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.163.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.163.500.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA JAMBI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5.900.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA JAMBI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5.900.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	250.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	7.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	95.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	95.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	80.000.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KOTA JAMBI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KOTA JAMBI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	535.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA JAMBI	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	535.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 31 Unit	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 31 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	280.000.000	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA JAMBI	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA JAMBI	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA JAMBI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA JAMBI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	
	Pengadaan Mebel	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	40 Buah	50.000.000	Pengadaan Mebel	KOTA JAMBI	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	40 Buah	50.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA JAMBI	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	574.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA JAMBI	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	574.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	559.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	559.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA JAMBI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	15.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA JAMBI	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	410.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA JAMBI	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	410.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA JAMBI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA JAMBI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA JAMBI	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	235.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA JAMBI	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	235.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA JAMBI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA JAMBI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KOTA JAMBI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KOTA JAMBI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	90%	773.178.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	90%	773.178.000	

1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7 Dokumen	108.178.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7 Dokumen	108.178.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KOTA JAMBI	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 dokumen	66.178.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KOTA JAMBI	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 dokumen	66.178.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2 dokumen	42.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2 dokumen	42.000.000	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	665.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	665.000.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	160.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	160.000.000	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	100%	505.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	100%	505.000.000	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	260.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	260.000.000	

	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	KOTA JAMBI	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 Dokumen	180.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	KOTA JAMBI	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 Dokumen	180.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80.000.000	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	245.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	245.000.000	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	2 Dokumen 4.500 Pelaku Usaha 450 Kegiatan Usaha	245.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	2 Dokumen 4.500 Pelaku Usaha 450 Kegiatan Usaha	245.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	KOTA JAMBI	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	KOTA JAMBI	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	55.000.000	

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	KOTA JAMBI	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	4.250 Pelaku Usaha	60.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	KOTA JAMBI	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	4.250 Pelaku Usaha	60.000.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	KOTA JAMBI	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	50.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	KOTA JAMBI	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	50.000.000	
Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	KOTA JAMBI	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	450 Kegiatan Usaha	80.000.000	Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	KOTA JAMBI	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	450 Kegiatan Usaha	80.000.000	

V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	90%	460.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	90%	460.000.000	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	261 Kegiatan Usaha 120 Pelaku Usaha	460.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	261 Kegiatan Usaha 120 Pelaku Usaha	460.000.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	KOTA JAMBI	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	65.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	KOTA JAMBI	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	65.000.000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	KOTA JAMBI	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	256 Pelaku Usaha	100.000.000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	KOTA JAMBI	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	256 Pelaku Usaha	100.000.000	

	Pengawasan Penanaman Modal	KOTA JAMBI	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	KOTA JAMBI	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	220.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	KOTA JAMBI	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	220.000.000	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	7 Dokumen	220.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA JAMBI	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	7 Dokumen	220.000.000	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	KOTA JAMBI	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	220.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	KOTA JAMBI	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	220.000.000	
--	--	------------	--	-----------	-------------	--	------------	--	-----------	-------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah, RPJMD disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Hal ini guna memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengakomodir isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN 2025-2029, dalam perumusan Visi dan Misi diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029. Selain itu, perumusan substansi keterhubungan antar dokumen berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memiliki hubungan keterkaitan yang hirarkis dan saling mendukung dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD menjadi dokumen induk yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan rencana strategis lima tahun kedepan dengan Visi ***"Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera"***. Untuk melaksanakan visi tersebut salah satu misi Pemerintah Kota Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah misi kedua ***"Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan"***, dan misi ketiga ***"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"***

Misi pembangunan tersebut memberikan arah bagi tujuan pembangunan dalam menjabarkan misi pembangunan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi tersebut agar dicapai target spesifik dalam proses pembangunan. Adapun tujuan pembangunan Kota Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah ***"Pengembangan pusat-pusat ekonomi kota dalam mendukung penyiapan dasar transformasi ekonomi"*** serta melaksanakan ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"***

Sasaran pembangunan merupakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran pembangunan seringkali bersifat lebih spesifik dan terukur dibandingkan dengan tujuan Pembangunan. Adapun sasaran pembangunan Kota Jambi yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah ***"Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif serta Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik"***.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun
					2026
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan realisasi investasi	Persentase peningkatan investasi	%	3,4	5,1
Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	3,54	3,93

Misi Kota Jambi tentang Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan diselenggarakan dengan strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi, penyiapan regulasi yang mendorong perkembangan lptek dan penerapan ekonomi hijau, pelatihan peningkatan daya saing UMKM/UKM, serta penguatan usaha BUMD. Strategi yang dilakukan merupakan Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah dan Upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya tahapan, fokus serta penentuan program dan kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat daerah.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan realisasi investasi	Penyiapan regulasi kemudahan berinvestasi serta menyediakan road map dan peta potensi penanaman modal	Penyusunan perda kemudahan investasi dan pembuatan rencana penanaman modal serta peta potensi unggulan investasi Kota Jambi
		Peningkatan minat investor berinvestasi di Kota Jambi.	Menyusun dan melaksanakan promosi investasi yang efektif dan efisien
		Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan lainnya	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Pengendalian kegiatan usaha agar terciptanya kepastian hukum dalam berusaha	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha melalui pengawasan rutin dan insidentil agar terciptanya standardisasi kegiatan usaha

		Pemanfaatan data dan informasi dalam peningkatan investasi dan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan lainnya.	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi penanaman modal serta pemanfaatannya dalam pelayanan investasi serta perizinan berusaha.
Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan layanan yang ramah dan menarik dengan pengembangan sistem informasi di semua pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik	Melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat (IKM)

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 -2029.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2026 merupakan operasionalisasi dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Jambi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Jambi serta dukungan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagaimana diuraikan pada Sub bab diatas. Efektivitas dan efesiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut adalah rangkaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Bangka, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. *Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN*
2. *Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
3. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd*
4. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran Skpd*

C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
2. *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

D. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
2. *Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*
3. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
4. *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
5. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd*

E. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*
2. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

F. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan*
2. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan*
3. *Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya*
4. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

A. PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal*

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

A. PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

A. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- 1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah*
- 2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik*
- 3. Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*
- 4. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya*
- 2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha*
- 3. Pengawasan Penanaman Modal*

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

A. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, peningkatan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan promosi dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2026 terdapat 6 Program, 18 Kegiatan dan 21 Sub kegiatan.

Indikator kinerja program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat ditunjukkan oleh Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4. 1 TC 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.083.178.000			10.021.000.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	7.850.000.000	Kota Jambi	BB	8.705.000.000
2.18.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74	22.500.000	Kota Jambi	75	26.500.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000	Kota Jambi	4 Dokumen	8.000.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16.500.000	Kota Jambi	5 Laporan	18.500.000
2.18.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	6.163.500.000	Kota Jambi	100%	6.496.500.000
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5.900.000.000	Kota Jambi	60 Orang/Bulan	6.200.000.000
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	250.000.000	Kota Jambi	30 Dokumen	280.000.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.500.000	Kota Jambi	1 Laporan	8.000.000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	7.000.000	Kota Jambi	10 Laporan	8.500.000
2.18.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	IP ASN Perangkat Daerah	82	95.000.000	Kota Jambi	83	125.000.000
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	80.000.000	Kota Jambi	113 Paket	100.000.000
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.000.000	Kota Jambi	30 Orang	25.000.000
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	535.000.000	Kota Jambi	100%	617.000.000
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	9 Paket	20.000.000	Kota Jambi	9 Paket	22.000.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket 31 Unit	200.000.000	Kota Jambi	4 Paket 20 Unit	220.000.000

2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Kota Jambi	2 Paket	25.000.000
2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.000.000	Kota Jambi	2 Laporan	30.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	280.000.000	Kota Jambi	2 Laporan	320.000.000
2.18.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	50.000.000	Kota Jambi	100%	207.000.000
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	-	Kota Jambi	5 Unit	150.000.000
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Buah	50.000.000	Kota Jambi	20 Buah	57.000.000
2.18.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	574.000.000	Kota Jambi	100%	643.000.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	559.000.000	Kota Jambi	2 Laporan	618.000.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	15.000.000	Kota Jambi	21 Laporan	25.000.000
2.18.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%	410.000.000	Kota Jambi	100%	590.000.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	25.000.000	Kota Jambi	39 Unit	28.000.000
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	235.000.000	Kota Jambi	30 Unit	240.000.000
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50.000.000	Kota Jambi	80 Unit	62.000.000
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kota Jambi	1 Unit	260.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Investasi	90%	268.178.000	Kota Jambi	90%	278.000.000
2.18.02.2.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7Dokumen	108.178.000	Kota Jambi	4 Dokumen	116.000.000
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 dokumen	66.178.000	Kota Jambi	2 dokumen	70.000.000
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2 dokumen	42.000.000	Kota Jambi	1 dokumen	46.000.000
2.18.02.2.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.000.000	Kota Jambi	1 Dokumen	162.000.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	160.000.000	Kota Jambi	1 dokumen	162.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	100%	260.000.000	Kota Jambi	100%	288.000.000

2.18.03.2.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	3 Dokumen	260.000.000	Kota Jambi	3 Dokumen	288.000.000
2.18.03.2.01.0002	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>180.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>200.000.000</i>
2.18.03.2.01.0003	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>80.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>88.000.000</i>
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100%	245.000.000	Kota Jambi	100%	260.000.000
2.18.04.2.01	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	100%	245.000.000	Kota Jambi	100%	260.000.000
2.18.04.2.01.0005	<i>Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>55.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>63.000.000</i>
2.18.04.2.01.0006	<i>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik</i>	<i>4.250 Pelaku Usaha</i>	<i>60.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>4.500 Pelaku Usaha</i>	<i>62.000.000</i>
2.18.04.2.01.0007	<i>Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>250 Pelaku Usaha</i>	<i>50.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>300 Pelaku Usaha</i>	<i>52.500.000</i>
2.18.04.2.01.0008	<i>Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	<i>450 Kegiatan Usaha</i>	<i>80.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>475 Kegiatan Usaha</i>	<i>82.500.000</i>
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	90%	240.000.000	Kota Jambi	90%	250.000.000
2.18.05.2.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	240.000.000	Kota Jambi	100%	250.000.000
2.18.05.2.01.0004	<i>Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>11 Kegiatan Usaha</i>	<i>65.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>13 Kegiatan Usaha</i>	<i>68.000.000</i>
2.18.05.2.01.0005	<i>Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>120 Pelaku Usaha</i>	<i>100.000.000</i>	<i>Kota Jambi</i>	<i>160 Pelaku Usaha</i>	<i>105.000.000</i>

2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	Kota Jambi	255 Kegiatan Usaha	77.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	220.000.000	Kota Jambi	100%	240.000.000
2.18.06.2.01	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	7 Dokumen	220.000.000	Kota Jambi	7 Dokumen	240.000.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	220.000.000	Kota Jambi	7 Dokumen	240.000.000
TOTAL RENCANA PAGU ANGGARAN DPMPTSP TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU 2027				9.083.178.000			10.021.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Jambi Tahun 2026 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat pengukuran kinerja dan keuangan daerah 2020-2024 yang merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman perencanaan kinerja. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam kerangka penyusunan RAPBD Kota Jambi Tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kota Jambi. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Jambi Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian - penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



YON HERI, SP, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19690801 199703 1 007